



KURIKULUM DAN PENGEMBAGANGAN KURIKULUM SECARA ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS DAN YURIDIS

Sukatin¹, Muammar Qaddafi², Juanda Khalimatun Nuha³,
Muhammad Habibi⁴

¹ Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

² Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

³ Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

⁴ Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

Email : shukatin@gmail.com, khalitunnuhaj@gmail.com, hh5350888@gmail.com

E-Issn: 3063-8313

Received: January 2025

Accepted: January 2025

Published: February 2025

Abstract :

In Indonesia, the development of its educational curriculum is based on the philosophical foundation of Pancasila as the state ideology, which essentially serves as a medium for the transfer and realization of Pancasila values into educational practice and learning. The main mission and position of educators are to instill, form, fill, develop, expand, refine, and pass on cultural values, knowledge, morals, attitudes, skills, and technology to students and society. To meet the above demands, Indonesia has continuously developed its educational curriculum over time, supplemented by supporting tools such as mastery of various facts, concepts, principles, norms, ideas, procedures, and various scientific abilities, as well as various life skills, both written and digital, which exist within the context of learning literacy. The development and formulation of this curriculum depend on state policies that continuously adapt to global developments and changes.

Keywords : Understanding Curriculum, Ontological, Epistemological, Axiological, Juridical

Abstrak :

Di Indonesia pengembangan kurikulum pendidikannya berangkat dari fondasi falsafah Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya wadah transferansi serta pengejawantahan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Misi dan posisi utama pendidik adalah melakukan penanaman, pembentukan, pengisian, pengembangan, perluasan dan penghalusan, serta pewarisan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, moral, sikap, keterampilan, dan teknologi kepada peserta didik dan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, dari masa ke masa Indonesia telah menyusun kurikulum pendidikannya yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendukungnya seperti penguasaan aneka fakta, konsep, prinsip, kaidah, ide, prosedur, dan berbagai kemampuan saintifik, aneka kecakapan hidup baik berupa tertulis maupun digital yang berada dalam konteks literasi pembelajaran.

Pengembangan dan penyusunan kurikulum ini tergantung dari kebijakan negara yang terus mengikuti perkembangan dan perubahan global baik nasional maupun internasional (A IMS) seperti milineal education yang berguna bagi peserta didik di sekolah dan di luar sekolah terutama sekolah yang beragam peserta didiknya. Sebelum mengurai lebih jauh tentang kurikulum secara umum terlebih dulu kita lakukan pengkajian/ telaah filsafat.

Kata Kunci: Pengertian Kurikulum, Ontologis, Epistimologis, Aksiologis, Yuridis.



INTRODUCTION

Filsafat dan kurikulum pendidikan, merupakan dua komponen penting yang saling berkaitan dan memiliki hubungan mendasar. Keduanya sangat menentukan paradigma pendidikan. Filsafat bekerja untuk menyusun paradigma serta mengokohkan keberadaan nilai, arah, dan pandangan yang dianut kurikulum baik konteks, konten, maupun implementasinya di dalam pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan kurikulum pendidikan disusun berdasarkan falsafah, nilai, norma, moral yang dianut suatu bangsa. Oleh karena itu eksistensi keduanya menjadi pangkal tolak, jejak awal dan perhatian utama setiap perancangan dan pengembangan pembelajaran, sekaligus mengatasi masalah krusial pendidikan. Keduanya concern pada pertanyaan utama yaitu: "Untuk menjadi apa peserta didik kelak?" (what can man become?), Dilihat dalam perspektif ini, pekerjaan kurikulum harus memastikan jawaban di atas, meskipun kurikulum hanya suatu aspek khusus filsafat, namun perlu didukung oleh teori-teori umum pendidikan agar pangkal tolak pengembangan kurikulum pendidikan menjadi lebih kuat, (Johnson, 1967).

Di Indonesia pengembangan kurikulum pendidikannya berangkat dari fondasi falsafah Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya wadah transferansi serta pengejawantahan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Misi dan posisi utama pendidik adalah melakukan penanaman, pembentukan, pengisian, pengembangan, perluasan dan penghalusan, serta pewarisan nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, moral, sikap, keterampilan, dan teknologi kepada peserta didik dan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, dari masa ke masa Indonesia telah menyusun kurikulum pendidikannya yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat pendukungnya seperti penguasaan aneka fakta, konsep, prinsip, kaidah, ide, prosedur, dan berbagai kemampuan saintifik, aneka kecakapan hidup baik berupa tertulis maupun digital yang berada dalam konteks literasi pembelajaran.

Pengembangan dan penyusunan kurikulum ini tergantung dari kebijakan negara yang terus mengikuti perkembangan dan perubahan global baik nasional maupun internasional (A IMS) seperti *mileneal education* yang berguna bagi peserta didik di sekolah dan di luar sekolah terutama sekolah yang beragam peserta didiknya. Sebelum mengurai lebih jauh tentang kurikulum secara umum terlebih dulu kita lakukan pengkajian/telaah filsafat.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis konten filosofis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengembangan kurikulum dari perspektif ontologis, epistemologis, dan yuridis, yang berlandaskan pada filosofi pendidikan dan kebijakan pendidikan Indonesia. Lokasi penelitian adalah Fakultas Pendidikan Islam dan Pelatihan Guru, Universitas Islam Batanghari, di mana para peneliti mengakses dokumen kurikulum, silabus, dan melakukan diskusi terfokus dengan pengembang kurikulum dan dosen di bidang pendidikan Islam. Subjek penelitian adalah dokumen pengembangan kurikulum, catatan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, dan interpretasi ilmiah yang berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam pendidikan. Informan termasuk dosen senior dalam filosofi pendidikan dan studi kurikulum, khususnya mereka yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi program pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen dan wawancara mendalam.

FINDINGS AND DISCUSSION

Studi ini menemukan bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia sangat berakar pada prinsip-prinsip filosofis, khususnya Pancasila, serta nilai-nilai etika Islam. Dari perspektif ontologis, kurikulum mencerminkan berbagai asumsi tentang realitas: dari pandangan metafisik-religius hingga interpretasi empiris-ilmiah dan pengalaman-manusia. Pluralisme dalam dasar-dasar ontologis ini membentuk keragaman tujuan pembelajaran dan isi mata pelajaran. Dari aspek epistemologis, studi ini mengidentifikasi tiga sumber utama pengetahuan: berdasarkan wahyu (supernatural), empiris, dan pengalaman-pribadi. Ini memengaruhi bagaimana konten kurikulum dipilih, apakah berdasarkan otoritas skriptural (seperti pendidikan agama), verifikasi ilmiah (seperti dalam ilmu alam), atau pendekatan konstruktivis (seperti dalam pendidikan sosial dan karakter). Metode ilmiah, pemikiran kritis, dan pembelajaran berbasis logika disoroti sebagai pusat pengembangan epistemologis dalam praktik kurikulum.

Dari segi aksiologi, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dan estetika yang selaras dengan jati diri bangsa, pengembangan moral, dan martabat manusia. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membentuk pendidikan karakter dan memperkuat norma-norma kemasyarakatan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan ajaran Islam.

Dari sudut pandang yuridis, pengembangan kurikulum berpedoman pada hukum-hukum dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan sejak Kurikulum 1947. Kerangka hukum tersebut memastikan bahwa kurikulum selaras dengan tujuan nasional, komitmen ideologis, dan kesinambungan sejarah-budaya. Penelitian ini juga mencatat bahwa kurikulum awal sangat dipengaruhi oleh upaya pembangunan bangsa pascakolonial, yang menekankan patriotisme, tanggung jawab

kewarganegaraan, dan pengabdian agama.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti bahwa pemahaman terpadu tentang landasan filosofis dan hukum sangat penting untuk merancang kurikulum yang relevan, transformatif, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan spiritual.

A. Ontologi

Ontologi adalah pengkajian filsafat terkait dengan hakikat realita (the nature of reality) yang menanyakan tentang: "Apakah realita itu?" dan Apa pula realitas pendidikan dan pembelajaran? Realita dapat dilihat secara berbeda-beda sesuai dan kultur yang mereka anut. Pengkajiannya dimulai dari ide-ide seperti: Kebertuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Keadilan, Kesetiaan, Demokrasi, Kebahagiaan, atau cinta yang bersifat riil. Terkait dengan ontologi pendidikan para ahli pendidikan sependapat bahwa ontologi pendidikan merasakan realita suatu benda hanya dengan jalan menuliskan nama benda, merasakan dan menyelami keberadaan benda-benda tersebut yang sebenarnya bukan benda itu sendiri dan juga bukan tinta yang tertera di atas kertas, melainkan realita yang berbeda dengan fisik dan simbol-simbol benda itu.

Simbol-simbol dipakai sebagai cara utama manusia untuk memahami keberadaan benda-benda di muka bumi dan jagad raya ini. Simbol-simbol diperlukan dalam komunikasi, informasi, dan ungkapan ide-ide yang diperlukan masyarakat. Bahayanya adalah banyak orang menganggap bahwa dalam kurikulum, simbol-simbol menggantikan dan malah lebih superior dari benda yang disimbolinya. Akibatnya, kurikulum yang disusun cenderung lebih menekankan kajian yang abstrak seperti geometri, kalkulus, trigonometri, tanpa mengingat bahwa simbol-simbol itu belum sepenuhnya identik dengan dunia empiris.

Para ahli pendidikan menempatkan nilai ontologi kurikulum lebih tinggi daripada benda-benda dan simbol-simbol yang dianggapnya cenderung mengarahkan kurikulum pada penekanan subjek di laboratorium fisika/biologi/kimia, geofisika, dan lainnya. Kegiatan belajar yang dituntut kurikulum umumnya cenderung menempatkan peserta didik berkontak langsung dengan lingkungan nyata, dengan metode karyawisata dan demonstrasi terhadap objek fisik. Dengan demikian, para pakar pengembangan kurikulum tidak dapat mengabaikan antara pengajaran teori dengan aplikasi/implementasi saja melainkan harus menentukan arah yang dianut Oleh penyusun dan pelaksana tentang realita.

Ontologi dalam filsafat dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan pemikiran yang berbeda-beda. Pandangan filsafat pada awal kebudayaan manusia sangat bervariasi tergantung pada aliran-aliran keagamaan yang spesifik, mereka memandang dan menempatkan realita pada ranah supernatural (ranah spritual ketuhanan atau ranah ide-ide yang bersumber dari Plato). Pengaruh ontologi supernatural ini masih dominan terutama para pengambil keputusan kurikulum di berbagai negara saat ini seperti, Amerika Serikat. Sumber realita kedua bertumpu pada asumsi bahwa

sumber realita ini berada di bumi, sekitar tempat manusia hidup sehingga aliran ontologi bumi sangat berpengaruh terhadap pengembangan sains modern dan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat.

Ontologi yang ketiga adalah ontologi manusia dengan aliran filsafat yang paling akhir yang mendasarkan pikirannya pada asumsi bahwa realita berada dalam pengalaman manusia. Dengan kata lain, pembicaraan tentang lokasi dan hakikat realita tidak dapat diketahui secara langsung karena realita terakhir berada dalam diri individu itu sendiri.

B. Epistemologi

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan dan cara memperolehnya termasuk menentukan kebenarannya.

Epistemologi mencoba menjawab pertanyaan: "Apakah kebenaran itu?" "Bagaimana kita mengetahui kebenaran itu ada ? " dan "Bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar tahu?" Epistemologi yang berkaitan dengan kurikulum selalu berusaha mengungkap kebenaran dan kesalahan berpikir dan bertindak di dalam pembelajaran. Pandangan ini bertumpu pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan merupakan jantung/ pusat perhatian kurikulum, pendidikan, dan pembelajaran.

Telaah selanjutnya adalah melihat hubungan erat antara epistemologi dengan ontologi. Keduanya memandang masalah asal-usul manusia. 'Apakah manusia itu berasal dari kera?' jika kita menuruti ontologi supernatural, maka kita mengajarkan anak-anak kita bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang menegaskan bahwa realita berada di dunia lain (an other-worldly). Sedangkan epistemologi memiliki asumsi, bahwa kebenaran diwahyukan kepada manusia oleh kekuatankekuatan supernatural. Jika dilihat teori-teori Darwin asumsinya bahwa kebenaran ditemukan secara ilmiah dengan menguji kebenaran yang ada di bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi dunia lain (supernatural) mengarah pada epistemologi supernatural dan ontologi bumi menghasilkan epistemologi empiris. Keduanya memiliki hubungan yang erat di mana terdapat cara-cara tertentu untuk mengetahui sesuatu menurut masing-masing ontologi, walaupun berikutnya dibicarakan ciri dan cara manusia mengetahui sesuatu menurut masing-masing ontologi, tetapi harus diingat bahwa tidak terdapat dikotomi yang komplementer. Umumnya perbedaan epistemologi pengetahuan tidak tajam dan bukan secara eksklusif kepunyaan ontologi tertentu.

Karakteristik cara memperoleh pengetahuan menurut ontologi supernatural adalah bahwa ilmu pengetahuan yang baik harus diterima, artinya manusia menerima saja ilmu pengetahuan yang diturunkan dari dunia lain (supernatural) seperti ajaran keagamaan, atau berdasarkan ide-ide yang diberikan para filosofis seperti ide Plato, Rousseau, dan lain-lain. Cara penerimaan pengetahuan, menurut ontologi supernatural adalah melalui wahyu/bersifat keagamaan dan dari narasumber pengetahuan itu sendiri yang sifatnya ide-ide. Ilmu pengetahuan yang diwahyukan maupun yang diberikan narasumber dianggap penerimanya sesuatu yang autentik, bernilai tinggi, dan

dianggap memiliki kebenaran absolut.

Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi sering kali dipakai untuk menyatakan pengetahuan yang datang tiba-tiba dan tidak dapat dibuktikan secara empiris dan tidak memiliki konotasi mistis dan hasil dari akumulasi ilmu pengetahuan yang diperoleh masa lalu. Analisis ilmiah menyatakan bahwa intuisi bukanlah epistemologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang diterima. Oleh karena tidak semua orang menerima wahyu, ontologi supernatural menggunakan metode alternatif dalam menyebarkan pengetahuan yang baik. Ilmu yang diwahyukan ditulis pada kitab suci sehingga orang lain yang tidak menerima wahyu dapat memperolehnya. Dengan demikian orang-orang tertentu yang menguasai ilmu pengetahuan yang tertera dalam kitab suci dipandang orang pintar dan kebenaran dalam kitab suci dipandang kebenaran yang absolut, lalu timbullah pengetahuan otoritas dari para ahli (knowing by authority).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pekerja kurikulum penganut ontologi supernatural tidak mengalami kesukaran dalam menentukan konten yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum sebab konten tersebut telah ada pada kitab suci. Penganut ontologi bumi memandang bahwa materi dunia ini adalah realita terakhir, data yang diperoleh melalui indra dianggap jalan paling dipercaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Semua ontologi harus dapat menerima yang dapat diakses melalui pancaindra namun mereka percaya bahwa realita terakhir selalu ada dalam materi jagad raya. Pikiran sehat yang menghasilkan pengetahuan tentang dunia, tidak dapat dipisahkan dari kenyataan terakhir yang mereka definisikan: epistemologi sebagai proses penemuan (discovery), yang berasal dari hasil "membuka realita dunia ini". Penemuan yang didasarkan pada kemampuan indrawi manusia kurang dapat diterima karena konsepsi manusia tidak sempurna seperti yang dipikirkan orang.

Keberagaman dan keanekaragaman persepsi manusia telah membukakan jalan bagi ontologi bumi untuk mencari pengetahuan melalui verifikasi antar ahli yang dikenal dengan "persepsi kolektif" yang lebih umum dikenal dengan sebutan akal sehat (common sense). Melalui simbol, orang dapat melakukan komunikasi satu sama lainnya dan sharing pengalaman artinya dengan cara ini, dimungkinkan keinginan untuk saling mengoreksi kebenaran konsepsi masing-masing guna mencapai kesepakatan tentang ilmu pengetahuan apa yang tepat bagi pengambil keputusan. Meskipun metode telah menunjukkan keberhasilan menganalisis data melalui indrawi, namun logika tetap mengikuti aturan yang sistematis dan tetap menjadi alat penting untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang kita kenal dengan silogis. Silogisme adalah contoh yang baik untuk menunjukkan peranan logika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dalam ketidakadaan data sensoris, contohnya: semua wanita akan mati (premis), Miss Amerika adalah wanita (premis) Miss Amerika juga akan mati (kesimpulan).

Dua statemen pertama diperoleh melalui pengalaman sensoris, ternyata Miss Amerika masih hidup dan segar bugar. Kita tidak dapat mengetahui

melalui pengalaman sensori bahwa wanita itu akan mati. Dan pada saat kematian tiba, kita yakin ia meninggal. Jadi silogisme mampu menghasilkan pengetahuan untuk mencapai suatu kesimpulan yang benar meskipun data sensori tidak tersedia saat itu. Dua cara perolehan pengetahuan yaitu diskoveri dan penerimaan merupakan epistemologi yang mutlak benar keduanya telah memperlihatkan perbedaan, yang satu melalui proses meneliti yang didukung buktibukti untuk mencari kebenaran, sedangkan yang lain melalui wahyu dan otoritas ilmiah. Terkait dengan konten kurikulum, epistemologi penemuan lebih mementingkan pelajaran realita fisik seperti fisika, kimia, biologi agar anak dapat memahami pola alamiah benda-benda alam nyata dan akan mempelajari sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk memperoleh hukum tingkah laku manusia secara individu dan kelompok. Pemilikan pengetahuan menurut ontologi, manusia

hampir sama dengan ontologi bumi, hanya perbedaannya, ontologi manusia tidak ada pernyataan kebenaran mutlak yang diperoleh, Ilmu pengetahuan selalu disaring oleh pengalaman, artinya pengalaman merupakan bahan baku untuk pembentukan konsepsi dan konstruksi manusia dan lingkungannya.

Pemerolehan ilmu pengetahuan direkonstruksi dari pengalaman manusia yang dikenal dengan metode ilmiah dengan cara berpikir menyeluruh, reflektif, dan kritis. Metode ilmiah bekerja dengan lima langkah yaitu: 1) permasalahan; 2) perumusan masalah; 3) identifikasi semua kemungkinan solusi masalah; 4) identifikasi semua kemungkinan yang akan timbul; 5) pengujian konsekuensi melalui pengalaman. Tahapan metode ilmiah di atas cukup fleksibel, terbuka, dan bersifat tentatif. Bila dikaitkan dengan kurikulum, epistemologi merupakan konstruksi pengetahuan yang mempunyai beberapa karakteristik yang bersifat fleksibel, menekankan proses daripada konten, meskipun konten dan proses tidak dapat dipisahkan dan lebih ditekankan pada bagaimana siswa dapat merekonstruksi ilmu pengetahuan.

C. Aksiologi

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang value/nilai. Aksiologi dibagi dua kategori utama yaitu: etika dan estetika. Etika terkait pengkajian konsep benar dan salah, baik dan buruk/jahat kehidupan sehari-hari. Estetika berkaitan dengan kualitas kecantikan dan kenikmatan yang dialami manusia. Etika dan estetika ini menjadi krusial di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan.

Etika terkait dengan pengkajian nilai, norma, dan moral. Dalam posisi ini pendidikan bekerja untuk melakukan penanaman, pembentukan, pengisian, pengembangan, perluasan, dan penghalusan nilai, norma dan moral yang dituntut oleh falsafah Negara Pancasila, agama, dan budaya sehingga peserta didik memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan di atas. Untuk itu diperlukan kurikulum yang nyata, terencana, serta tindakan yang menyeluruh dan sistematis.

D. Landasan Yuridis

Istilah kurikulum saat itu disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang

disebut sebagai Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum

pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendidikan sebelumnya berdasarkan kepentingan penjajah. Dasar dan tujuan pendidikan dirumuskan Oleh penjajah. Mulai Kurikulum 1947 dasar hukumnya mengikuti dasar hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Landasan ideal pendidikan di Indonesia yang dianut dalam Kurikulum 1947 adalah Pancasila dan UUD 1945 (Gunawan, 1986, dan Ahmadi, 1991) Pancasila tidak hanya sekedar dasar dan falsafah negara Indonesia, tetapi juga landasan ideal pendidikan di Indonesia. Dasar konstitusional pendidikan nasional juga dijadikan dasar konstitusional Kurikulum 1947 adalah (JUD 1945. Dengan berlakunya UUD 1945 di negara Indonesia maka semua produk hukum yang ada pada saat itu, termasuk semua peraturan yang ada kaitan dengan pendidikan.

Berlakunya Kurikulum 1947 tidak diiringi dengan landasan operasional, berupa Undang-Undang Pendidikan. Saat itu yang paling penting adalah mengubah dasar dan landasan pendidikan, artinya landasan pendidikan di Indonesia tak lagi menggunakan landasan pendidikan penjajah. Bukan berarti tidak ada usaha Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran untuk membuat Undang-Undang Pendidikan sebagai landasan operasional tetapi terkendala oleh faktor politik. Tanggal 1 Juli terjadi Clash (perang kemerdekaan) pertama saat itu Belanda bermaksud lagi menduduki wilayah negara RI. Pada akhir tahun 1947 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Mr. Ali Sastro Amidjoyo yang menggantikan Mr. Soewandi, beliau mencoba meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh Mr. Soewandi bersama BPKFJIP Mr. Ali Sastro Amidjoyo membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran dengan tugasnya menyusun RUUP dengan mempergunakan bahan yang pernah diperbincangkan oleh Kongres Pendidikan Nasional.

Sebelum tahun 1945 atau sebelum Indonesia merdeka tujuan pendidikan di Indonesia dirumuskan Oleh penjajah. Sistem pendidikan diarahkan untuk mempertahankan kedudukannya di tanah jajahan. Bahkan pada zaman Jepang, terjadi indoktrinasi yang cukup ketat yang dilakukan Oleh Jepang. Mereka berusaha men-Jepang-kan Indonesia terutama pemuda-pemudanya. Oleh karena pada saat kemerdekaan diraih sangat dibutuhkan penanaman semangat patriotisme dan membangkitkan kesadaran nasional di kalangan remaja dan pemuda.

Berkaca dari situasi seperti itu tujuan pendidikan nasional 1945 pun tidak jauh dari situasi saat itu. Menurut Gunawan (1986) tujuan pendidikan nasional pada tahun 1945 adalah pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan bangsa Indonesia. Dari rumusan itu sangat jelas bahwa tujuan pendidikan nasional saat itu diarahkan pada penanaman semangat patriotisme dan kesadaran nasional.

Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional, pada tahun 1946 Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia

mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara Republik Indonesia. Selanjutnya jabaran sifat-sifat itu akan menjadi dasar tujuan Kurikulum 1947. Sifat-sifat kemanusiaan yang dimaksud (Gunawan, 1986) adalah: 1) Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. 3) Perasaan cinta kepada Bangsa dan Kebudayaan Nasional. 4) Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya. 5) Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. 6) Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang harus tunduk pada tata tertib. 7) Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu hubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasarkan atas rasa keadilan, dengan berpegang tengah atas harga diri sendiri. 8) Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajiban, jujur dalam pikiran dan tindakannya.

CONCLUSION

Filsafat dan kurikulum pendidikan, merupakan dua komponen penting yang saling berkaitan dan memiliki hubungan mendasar. Keduanya sangat menentukan paradigma pendidikan. Filsafat bekerja untuk menyusun paradigma serta mengokohkan keberadaan nilai, arah, dan pandangan yang dianut kurikulum baik konteks, konten, maupun implementasinya di dalam pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan kurikulum pendidikan disusun berdasarkan falsafah, nilai, norma, moral yang dianut suatu bangsa. Oleh karena itu eksistensi keduanya menjadi pangkal tolak, jejak awal dan perhatian utama setiap perancangan dan pengembangan pembelajaran, sekaligus mengatasi masalah krusial pendidikan. Keduanya concern pada pertanyaan utama yaitu: "Untuk menjadi apa peserta didik kelak?" (what can man become?), Dilihat dalam perspektif ini, pekerjaan kurikulum harus memastikan jawaban di atas, meskipun kurikulum hanya suatu aspek khusus filsafat, namun perlu didukung oleh teori-teori umum pendidikan agar pangkal tolak pengembangan kurikulum pendidikan menjadi lebih kuat, (Johnson, 1967).

REFERENCES

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2002. *Sabar Perisai Seorang Mukmin*, terj. Fadli. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1999. *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahran Abu Bakar, dkk. Semarang: Toha Putra.
- Al-Qordhowi, Yusuf. 1999. *Alquran Menyuruh Kita Sabar*, terj. Abdul Azis Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2005. *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Pusaka.
- Ilyas, Yunahar. 2000. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LIPPI.
- Khaldun. Ibn. 2009. *Mukaddimah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, Jakarta:

Pustaka Firdaus.

- Kraemer, T., & Ghouthier, M. H.J. (2013).How organizational pride and emotional exhaustion explain turnover intentions in call centers: A multi-group analysis with gender andorganizational tenure. *Journal of Service Management*,25 (1), 125-148. Doi 10.1108/JOSM-07-2013-0173.
- Qohar, Mas'ud Hasan Abdul. tt. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Bintang Pelajar.
- Rernawan, Erni. 2011. *Organization Culture, Budaya Organisasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sinamo, Jansen. 2002. *Etos Kerja; 21 Etos Kerja Profesional di Era Digital Global*, Jakarta: Institut Darma Mahardika.